

# PEMBERDAYAAN MANUSIA INDONESIA

oleh  
Franz Magnis-Suseno SJ

## 1. Individu yang berkarakter

Dalam semua budaya primordial etika menjadi bagian yang sentral. Semula belum dibedakan antara ketentuan-ketentuan sopan-santun, hukum, religius-ritual-tradisional, aturan praktis tentang pekerjaan dan norma-norma moral. Begitu misalnya padi di Jawa harus dipotong dengan *ani-ani*, bukan dengan arit. Tetapi juga sesudah budaya berkembang dan terjadi diferensiasi di antara pelbagai aturan, suatu kelompok budaya akan memiliki keyakinan-keyakinan moral bersama: Tentang bagaimana orangtua harus dihormati, apa yang merupakan pencurian, tentang etika seksual, tentang keadilan dalam pelbagai konteks konkret, serta tentang apa yang dianggap pelanggaran serta sanksi-sanksi yang harus diberikan. Meskipun dalam dasar moralitas rupa-rupanya umat manusia bersatu pandangan-gannya, akan tetapi, sebagaimana ditemukan oleh para antropolog budaya, secara konkret perbedaan antara norma-norma moral di antara pelbagai kelompok budaya cukup besar juga.

Dalam masyarakat tradisional orang pada hakekatnya cukup kalau menyesuaikan diri dengan yang "biasa", "adat", ajaran "orang tua" dlsb. Tetapi sekarang dunia ini sudah ambruk. Individu sendirian menghadapi segala macam tantangan, ancaman dan gangguan. Acuan dulu, yaitu keserasan, sama sekali tidak membantu dalam kebingungan dan keterancaman itu. Sekarang kualitas masing-masing orang dituntut. Orang harus berkarakter, harus mampu menentukan sendiri sikap-sikapnya. Kalau manusia tidak mau tenggelam di alam pacaroba ini, ia harus dapat melahirkan daya-daya kemanusiaan baru. Ia perlu diberdayakan, maupun memberdayakan dirinya sendiri. Berikut dipaparkan dengan lebih rinci tantangan-tantangan yang dihadapi manusia Indonesia serta bagaimana individu maupun negara harus menanggulangi tantangan-tantangan itu.

## 2. Goncangan modernitas

Itu semua digoncangkan oleh modernitas. Modernitas secara keras merampungkan sebuah proses yang sebenarnya sudah dimulai oleh agama-agama besar (Habermas<sup>1</sup>), yaitu proses diferensiasi wilayah-wilayah kehidupan.<sup>2</sup> Di mana yang paling penting adalah perpisahan antara urusan privat dan urusan publik. Dan moralitas tegas-tegas ditempatkan di dalam wilayah privat. Apa yang dilakukan seseorang, atau beberapa orang dewasa yang sepakat di kamar mereka sendiri, bukanlah urusan negara. Otonomi moralitas pribadi terhadap pengaturan masyarakat termasuk keyakinan paling dasar moralitas politik pasca tradisional. Gerakan yang memperjuangkan kesadaran itu adalah *liberalisme*.<sup>3</sup>

Keyakinan masyarakat pasca tradisional bahwa negara tidak berhak mencampuri moralitas pribadi para warganya mempunyai dua latar belakang.

Yang pertama adalah sosiologis. Pandangan religius dan moral dalam masyarakat pasca tradisional semakin majemuk. Ada semakin banyak budaya lokal serta keyakinan religius. Negara hanya dapat mengharapkan memperoleh dukungan dan kesetiaan masyarakat apabila orang merasa bahwa keyakinan-keyakinan yang amat penting baginya dihormati oleh negara. Karena itu negara harus *hands off* dari apa yang dipercayai serta dianggap baik dan buruk oleh para warganya. Pandangan moral dan religius termasuk identitas individual dan sosial manusia dan karena itu harus dihormati oleh penguasa. Undang-undang hanya akan ditaati, dan warga hanya akan bersedia berkorban bagi negara (membayar pajak, mempertaruhkan nyawanya dalam keadaan perang) apabila undang-undang dasar dan hukum negara menghormati identitasnya itu. Dapat ditambah di sini bahwa pertimbangan pragmatis itu sudah membuat kerajaan-kerajaan kuno besar, seperti kekaisaran Romawi, Cina dan para penguasa Monggol untuk bersifat toleran dalam hal agama.

---

<sup>1</sup> Jürgen Habermas 1979, *Communication and the Evolution of Society*, London: Heinemann.

<sup>2</sup> Diferensiasi *moralitas* („*Sittlichkeit*“) modern itu pertama kali dianalisa oleh filosof Jerman Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831). Menurut Hegel moralitas pribadi menentukan kelakuan manusia dalam kehidupannya, khususnya dalam kehidupan keluarga. Hubungan fungsional dalam masyarakat ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Sedangkan negara, melalui sistem hukum, mempersatukan masyarakat dalam satu tubuh politik, lih. *Philosophy of Right*.

<sup>3</sup> Liberalisme adalah nama gerakan dan keyakinan bahwa kebebasan merupakan nilai pelindung harkat kemanusiaan paling dasar. Liberalisme untuk pertama kali muncul — belum dengan nama “liberalisme, nama itu pertama kali dipakai di Spanyol pada permulaan abad ke-19 — sebagai liberalisme politik dalam tuntutan — berlatar belakang filsafat John Locke (1632-1704) — bahwa kekuasaan negara adalah terbatas; liberalisme politik melahirkan paham *negara hukum konstitusional demokratis* yang kita yakini sekarang. Liberalisme ekonomis, *kapitalisme*, muncul 100 tahun kemudian. Liberalisme kultural — yang antara lain membawa “revolusi seks” - baru meluas sesudah perang dunia II, di tahun-tahun 60-an abad lalu.

Tetapi identitas moral dan religius tidak hanya dihormati karena alasan pragmatis. Alasan kedua bersifat prinsipiil (dan di Eropa sudah didiskusikan di abad pertengahan<sup>4</sup>). Paling lambat sejak Martin Luther (1483-1546) mempromosikan „kebebasan orang Kristen“ untuk sendiri membaca dan mengartika Kitab Suci, suara hati dianggap suci. Orang wajib berat untuk mengikuti suara hatinya dan berhak menuntut agar suara hatinya dihormati oleh siapa pun, khususnya juga oleh negara. Kesadaran amat prinsipiil itu didukung oleh pengalaman perang-perang agama di abad ke-16 dan ke-17. Hidup bersama masyarakat majemuk secara damai dalam satu negara hanya mungkin apabila suara hati para warga dihormati. Sejak 250 tahun kebebasan suara hati dan kebebasan beragama dianggap tonggak dasar etika publik negara demokratis modern. Pengakuan atas kebebasan suara hati itu adalah inti negara sekuler.

### 3. Tantangan bagi Indonesia di masa pancaroba

Untuk memahami guncangan-guncangan yang terus menerus dialami Indonesia kita harus selalu mengingat bahwa Indonesia berada di tengah-tengah sebuah proses transformasi sosial yang amat radikal: Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun suatu masyarakat sangat tradisional sudah berubah menjadi masyarakat modern. Modern terutama dalam arti negatif: Struktur-struktur sosial tradisional – adat, agama, tatanan feodal – sudah rusak dan tidak lagi dapat menyelamatkan individu, meskipun nilai-nilai sosialnya masih tertera di hati kebanyakan orang. Mau tak mau orang harus berjuang sendiri: di sekolah, dalam mencari tempat kerja, di tempat kerja, pada jaminan hari tua. Uang dan, paling-paling, koneksi (biasanya juga melalui uang) bisa membantu, tetapi „kampung“, „desa“, „gotong royong“ dan lain-lain tidak akan memberi dia makan. Hukum yang dengan keras menguasai perjuangan individu-individu Indonesia ini adalah persaingan. Mendahului segala neo-liberalisme masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat di mana pasar berkuasa dalam arti paling keras: Kau hanya akan hidup apabila menang dalam persaingan. Nilaimu tergantung dari apa yang dapat kau tawarkan. Hukum persaingan ini – *survival of the fittest* (Darwin) – berkuasa paling keras di lapisan bawah masyarakat.

Dengan demikian kesatuan antara moralitas dan budaya primordial sudah putus. Tak ada lagi budaya tradisional sebagai struktur sosial yang menunjang keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan moral yang masih terinternalisasi individu. Mobilitas masyarakat mendobrak kantong-kantong budaya tradisional yang masih utuh. Hanya agama yang masih bisa menyediakan ruang keamanan, juga orientasi moral, tetapi karena agama tidak lagi berdasarkan budaya lokal, agama cenderung menjadi semakin ideologis dan eksklusif, juga sebagai reaksi atas disorientasi moral akibat keambrokan masyarakat tradisional. Pandangan-pandangan moral barangkali tetap tegas, berdasarkan budaya primordial dan agama, tetapi tidak lagi seragam. Kontroversi sekitar RUU Pornografi merupakan ilustrasi terpecahnya kesatuan normatif dalam masyarakat.

Dengan demikian kita memperoleh situasi seperti berikut: Masyarakat Indonesia terdiri atas kelompok-kelompok budaya-religius dengan sikap-sikap budaya dan moral yang ditunjang oleh kelompok mereka, tetapi budaya kelompok-kelompok itu terisolasi dari kelompok-kelompok lain, tidak berakar dalam sebuah lingkungan fisik-alami tertentu – semua lingkungan ini semakin plural – dan tidak didukung oleh dinamika ekonomis yang menuntut perjuangan mati-matian untuk tidak tenggelam sendiri. Situasi ini rawan. Individu atau kehilangan sikap sikap moral yang tampak tidak kondusif dalam *struggle for survival*; kelas-kelas atas larut dalam korupsi yang lambat laun menghasilkan juga korupsi harkat kemanusiaan mereka, kelas-kelas bawah cenderung ke tindak-tanduk .kriminal, kekerasan, fanatisime. Melihat sekecap ke peta bumi Indonesia sudah cukup untuk meramalkan bahwa kalau bangsa terpecah ke dalam kelompok-kelompok keras, masing-masing dengan pandangan eksklusifnya yang dimutlakan, Indonesia yang kita kenal sudah tenggelam.

Demokrasi-demokrasi tua mencapai stabilitas mereka – padahal secara religius, dan, seperti Amerika Serikat, juga secara kultural, sangat plural – karena mereka berhasil membangun suatu moralitas politik yang sudah menjadi etika publik, artinya yang betul-betul dihayati oleh masyarakat sebagai cita-cita bersama yang mempersatukan mereka.<sup>5</sup> Tanpa etika politik yang berhasil menjadi etika publik yang dihayati sebagai moralitas pemersatu di Indonesia, negara ini tidak mungkin menjadi negara demokratis yang damai dan maju. Maka pertanyaan yang sekarang harus diajukan adalah: Adakah etika politik yang bisa menjadi moralitas bersama masyarakat, yang lintas

<sup>4</sup> Lih. Misalnya Thomas Aquinas (1225-1274), *Quaestiones quodlibetales* III, q. 12, a. 2; *de veritate* q. 17, a. 4 and 5.

<sup>5</sup> Bagi saya tetap paling mengesankan bagaimana rakyat Amerika Serikat menerima dan mengakui G. W. Bush sebagai presiden mereka 1999 (bahwa presiden ini kemudian menjadi malapetaka bukan hanya bagi AS merupakan masalah lain). Bush terpilih karena ia memperoleh suara-suara negara Florida, dengan mayoritas sekitar 230 suara (!) di atas lawannya Al Gore, padahal perhitungan manual. Permintaan Al Gore agar boleh diadakan penghitungan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan semua menerimanya, termasuk Al Gore sendiri dan para pemilih partai Demokrat. Dan itu meskipun di seluruh AS Al Gore mendapat 500.000 suara lebih banyak daripada Bush. Reaksi atas pemilihan Bush itu menunjukkan stabilitas dan kematangan demokratis yang mengagumkan, persis kebalikan dari ejekan Presiden Sukarno dulu bahwa demokrasi Barat adalah demokrasi 51%. Negara yang taat asas, dan prinsip-prinsip demokratis di mana presiden dengan *kurang dari 50%* (koalisi Helmut Kohl 1994 menang dengan 49,6%, oposisi mendapat 49,2%, sisanya tidak masuk parlemen karena *parliamentary threshold*) dapat berkuasa tak terganggu sesuai dengan undang-undang dasar adalah sesuatu yang luar biasa dan membuktikan kemampuan demokrasi untuk menciptakan stabilitas dan kepuasan masyarakat.

mendukung budaya masyarakat demokratis plural yang sekaligus mengembangkan secara positif identitas plural unik Indonesia?<sup>6</sup>

#### 4. Moralitas individual

Tetapi terlebih dahulu satu catatan tentang moralitas individual. Hormat terhadap suara hati setiap orang - suara hati adalah tempat di mana orang menyadari apa yang secara moral dituntut daripadanya - merupakan salah satu dasar etika politik modern yang tak dapat dan tak boleh dibiarkan digoncangkan lagi. Hormat itu menutup pintu terhadap usaha-usaha ideologis, baik ideologis sekuler maupun ideologis-keagamaan, untuk mau memastikan apa yang harus disadari sebagai kewajiban moral oleh seseorang.<sup>7</sup> Karena itu negara tidak mempunyai urusan dengan moralitas pribadi para warganya. Urusan negara adalah wilayah publik.<sup>8</sup>

Tetapi itu tidak berarti bahwa moralitas seseorang merupakan urusan individual belaka. Moralitas seseorang tidak berkembang di ruang kosong dan individu bukan sebuah atom yang mandiri. Melainkan moralitas berkembang dalam konteks *Lebenswelt* (Habermas), dalam interaksi dengan manusia-manusia di lingkungannya, dengan keluarganya, orang-orang di lingkungan hidup, dalam medan pandangan-pandangan moral masyarakat dan nilai-nilai budaya serta dengan lembaga-lembaga normatif non-negara yang oleh yang bersangkutan diakui sebagai berwenang. Di situ pertama-tama harus disebut *agama*. Dalam masyarakat pasca tradisional agama memang tidak berhak sama sekali untuk memaksakan sesuatu apa pun, dalam hal hidup bermoral maupun dalam apakah dan bagaimanakah ia aktif dalam agama, juga tidak terhadap warganya sendiri. Keluhuran agama dan wewenangnya semata-mata berdasarkan *wibawanya* yang dimilikinya dalam kesadaran para penganutnya. Wewenang agama bersifat *moral*, bukan hukum. Tetapi wewenang itu bagi penganut agama itu tinggi. Maka pandangan agama-agama tentang moralitas tetap akan memainkan peranan yang amat penting dalam setiap masyarakat agamis. Namun dalam masyarakat modern ada juga lembaga-lembaga normatif selain agama-agama, seperti misalnya kelompok-kelompok vegetarian, kelompok-kelompok sadar lingkungan hidup, pelbagai kelompok berfokus kesehatan menyeluruh, juga kelompok seperti biara-biara tertentu.

Maka negara “liberal” tidak mengambang dalam vakuum etis. Masyarakat tetap hidup dalam jaringan-jaringan sosial yang normatif bagi moralitasnya. Yang semuanya tidak dapat memaksa otonomi individu untuk akhirnya menemukan sendiri, dalam suara hatinya, apa yang wajib baginya dan apa yang tidak.

Tetapi pertanyaan kita bukan moralitas privat, melainkan etika publik. Akan tetapi, apakah masyarakat sebagai keseluruhan, dan itu berarti: masyarakat yang ditata dan diartikulasikan oleh *negara* mempunyai peran etis? Itulah pertanyaan tentang *etika publik*.

#### 5. Etika publik

Moralitas adalah dimensi yang melekat pada semua segi kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bagian realitas di mana manusia bergerak sebagai makhluk yang merasakan, mengetahui dan bertindak dan ia hanya bertindak dalam dimensi pilihan antara yang baik dan buruk. Moralitas adalah kewajiban manusia untuk tanpa kecuali memilih yang baik dan menolak yang tidak baik. Dan karena itu tak ada dimensi kemanusiaan yang bebas dari moralitas. Dan karena itu harus ada, dan ada, moralitas publik.

Moralitas publik terdiri atas ketertataan keseluruhan masyarakat – nilai-nilai dan cita-cita masyarakat, susunan institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan politik – pada yang baik dan pada penolakan yang jahat. Jadi politik bukan sesuatu yang semata-mata pragmatis. Pragmatisme murni tak lain adalah kesewenangan mereka yang berkuasa. Karena pragmatisme berarti bahwa keputusan diambil menurut apa yang dianggap menguntungkan oleh para pengambil keputusan dan karena apa yang menguntungkan satu pihak selalu juga merugikan pihak lain maka pragmatisme adalah ideologi yang melegitimasi wewenang para penguasa untuk menetapkan apa yang baik bagi semua. Dan itu tidak etis. Dimensi moralitas bagi politik dirumuskan oleh etika politik.

Oleh karena itu perhatian pada budaya – pada nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, mekanisme-mekanisme sosial masyarakat - tanpa adanya etika, tidak mencukupi. Budaya tanpa etika merosot menjadi kedaulatan mereka yang berotot. Jadi budaya nasional yang tangguh dan mutu harus ada etika nasionalnya. Tetapi di sini kita berhadapan

---

<sup>6</sup> Pertanyaan ini juga menunjukkan batas kemampuan liberalisme untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam suatu masyarakat. Hormat terhadap keutuhan dan otonomi masing-masing individu maupun bagian masyarakat - asal dalam rangka sebuah kerangka konstitusional dan legal yang rasional dan pasti - belum mencukupi untuk memobilisasikan perasaan solidaritas dan kesediaan untuk membatasi diri sebagaimana diperlukan apabila muncul konflik atau tantangan. Hal itu ditekankan oleh beberapa filosof *komunitarian* seperti Michael Walzer dan Charles Taylor.

<sup>7</sup> Adalah Immanuel Kant (1724-1804) yang secara definitif memperlihatkan bahwa moralitas mulai dengan hormat terhadap suara hati. Segala pengertian moralitas sebagai kesesuaian dengan peraturan atau hukum tertentu, atau dengan tujuan-tujuan tertentu, merupakan korupsi moralitas.

<sup>8</sup> Negara berhak membuat undang-undang yang mengatur/melarang pornografi (asal undang-undang itu dari sudut isi dan kejelasannya memenuhi syaratnya), tetapi tidak berhak untuk melarang orang mengisi waktunya dengan memandang gambar-gambar porno sejauh ia memperoleh gambar-gambar itu tanpa melanggar undang-undang.

dengan dilema. Tadi kita melihat bahwa salah satu kesepakatan modernitas – yang sendiri merupakan unsur dalam etika publik modernitas – adalah bahwa moralitas bukan wewenang negara. Padahal negara memerlukan kerangka moral yang dirumuskan oleh etika publik. Apakah tuntutan adanya etika publik tidak melanggar larangan bagi negara modern untuk memasuki wilayah moral?

Namun justru untuk mengatasi dilema itu kita membedakan antara moralitas privat dan moralitas publik. Yang pertamalah yang berada di luar wewenang negara. Tetapi bagaimana menentukan moralitas publik yang mengikat maupun diakui oleh masyarakat sebagai etis? Jelaslah bahwa negara, baik penguasa legislatif maupun eksekutif, tidak berwenang untuk menetapkannya atas kehendak atau kesadarannya sendiri. Etika publik tak bisa tidak berakar dalam alam nilai dan keyakinan moral masyarakat, merumuskannya dan mengembalikannya ke masyarakat agar masyarakat tidak hanya menghayatinya secara samar-samar, melainkan secara sadar, dan dengan demikian juga menjadi mampu untuk menghadapi segala macam tantangan. Negara demokratis mengelola proses timbal balik itu.

Akan tetapi, apakah segenap pandangan masyarakat – nilai-nilai, kesadaran moral – begitu saja memadai? Suatu faktisitas, sesuatu yang nyata-nyata terdapat dalam masyarakat, tak pernah langsung sudah normatif. „Moralitas masyarakat“ bisa cacat serius (contoh: pembenaran sosial luas terhadap perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan). Etika politik harus juga mengoreksi pandangan-pandangan masyarakat yang tidak benar. Lalu bagaimana penetapannya?

Di sini tidak ada tempat untuk memasuki diskusi mendalam dalam filsafat 50 tahun terakhir tentang masalah moralitas publik. Saya sebutkan saja nama beberapa filosof yang terlibat dalam diskusi ini: John Rawls, Richard Dworkin, Robert Nozick, Jürgen Habermas, Michael Walzer dan Charles Taylor.<sup>9</sup> Kita dapat bertolak dari beberapa pengandaian yang harus dipenuhi oleh etika publik. Etika publik harus

- dapat dipahami dan disetujui oleh seluruh masyarakat;
- menunjang harkat setiap orang sebagai manusia dan dirasakan seperti itu oleh masyarakat;
- menunjang persatuan masyarakat sebagai bangsa Indonesia dalam kesatuan negara Republik Indonesia.
- Menunjang identitas budaya nasional,
  - nasional bukan hanya dalam arti budaya nasionalis Indonesia (di mana misalnya termasuk *Indonesia Raya*, nilai simbolik *Sang Merah Putih* dan lambang-lambang kenegaraan lain);
  - melainkan juga dalam arti budaya lokal dan regional masing-masing, jadi budaya Indonesia dalam kemajemukan, itu pun dalam arti dinamis, artinya dengan memperhatikan bahwa dengan runtuhnya masyarakat adat budaya lokal/regional pun harus mengalami perkembangan, jadi juga perubahan, jadi juga „dimodernisasi“ (dalam arti yang di sini tidak mau didefinisikan; ambil sebagai contoh tarian „khas Bali“, tari kecak yang dalam kenyataan diciptakan oleh pelukis Jerman Walter Spieß; kalau sekarang masyarakat Bali melakukan upacara religius, asal tidak semata-mata di hotel untuk turis, upacara itu masih penuh arti bagi mereka, akan tetapi arti itu pasti sudah berbeda dari arti upacara sama 100 tahun lalu).
- Menunjang identitas religius masyarakat, artinya, tanpa memaksakan apa pun dalam hal agama, budaya nasional, dan segala kebijakan nasional menunjang dan tidak mengancam religiusitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk;
- Menunjang identitas budaya lokal, kesukuan dsb. (di mana terutama etnik-etnik dan komunitas bahasa yang kecil terancam punah identitas budaya mereka).

Adakah etika publik seperti itu dan bagaimana dapat dirumuskan? Etika publik itu tentu ada dan tidak perlu dicari susah-susah. Etika itu sudah dirumuskan dengan seksama dan bagus dalam alinea terakhir Undang-undang dasar 1945 dan, mengikuti Pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, disebut *Pancasila*.

## 6. Pancasila

Pancasila adalah tak lain etika publik bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar simbol yang disebutkan dalam pidato-pidato pada hari raya nasional, bukan juga sekedar mitos persatuan bangsa. **Melainkan Pancasila adalah rumusan nilai-nilai dan keharusan-keharusan dasar yang disepakati oleh bangsa Indonesia menjadi tujuan perjuangannya bersama, serta tujuan segala usaha untuk memajukan bangsa, jadi arah, tujuan akhir, legitimasi dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus terjelma dalam segenap kebijakan publik bangsa.**

Sebuah catatan pendahuluan. Agar Pancasila mendapat kembali kedudukannya yang sebenarnya dalam kesadaran nasional bangsa Indonesia perlu kita bertanya tuntutan etis apa yang termuat di dalamnya. Dalam

---

<sup>9</sup> John Rawls (1993, *Political Liberalism*; 2001, *Justice as Fairness. A Restatement*); Ronald Dworkin (1977, *Taking rights seriously*); Robert Nozick (1974, *Anarchy, State, And Utopia*); Jürgen Habermas (1996, *Between Facts and Norms. Contributions to Discourse Theory of Law and Democracy*); Michael Walzer (1983, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*); Charles Taylor (1976, "The Nature and Scope of Distributive Justice", dlm Ch. Taylor 1985, *Philosophy and the Human Sciences*, 289-317).

mencoba menggali tuntutan-tuntutan etis itu kita akan memperhatikan bahwa Pancasila tentu lebih kaya daripada sekedar merupakan etika publik meskipun itulah intinya. Pancasila juga mengungkapkan sesuatu yang penting dari *kepribadian bangsa Indonesia*, tepat disebut *falsafah bangsa Indonesia*, dan ada sebutan-sebutan lain (yang dulu dipelajari generasi saya dalam *penataran P-4*). Akan tetapi Pancasila mempunyai gigi sebagai etika publik. Dan kita harus ingat bahwa Pancasila adalah hasil tawar-menawar keras – sebagaimana wajar dalam politik – dalam rangka mencari kesepakatan seluruh bangsa, semua aliran tentang apa yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Hasil pergulatan jujur itu adalah Pancasila dan karena itu Pancasila adalah sesuatu yang amat serius, tidak untuk ditertawakan, tidak untuk diejek, tidak untuk disindir sebagai kesibukan orangtua, melainkan sebagai dasar kesepakatan rakyat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama. Cabutlah atau ubahlah Pancasila, dan dasar persatuan tercabut serta Indonesia telah mati. Barangkali Indonesia tanpa Pancasila masih bisa untuk sementara dipersatukan oleh senapan mesin dan teror pihak yang kebetulan berkuasa, sama seperti beberapa negara di Afrika di atas kertas masih bersatu, di mana persatuan itu hanya sekuat daya tembak dan pemerkosa serdadu-serdadu penguasa, tetapi Indonesia yang kita cintai sudah tidak ada. Sekali lagi, Pancasila itu serius dan jangan diizinkan dipermainkan. Malu suatu bangsa yang mempermainkan dasar-dasarnya (bayangkan Amerika Serikat main-main dengan *Declaration of Independence*-nya).

## **7. Pancasila, etika publik bangsa Indonesia**

Atas dasar catatan tadi mari kita sekarang mencoba untuk merumuskan gigi-gigi Pancasila sebagai etika publik. Di sini pun harus ditegaskan bahwa rumusan ini bisa dalam pelbagai bentuk. Rumusan berikut berusaha untuk mengangkat cita-cita dan kewajiban inti masing-masing sila. Saya akan merumuskannya dalam dua bentuk yang bersama baru membuat jelas apa yang terimplikasi dalam Pancasila, yaitu dalam bentuk positif, sebagai keharusan, dan dalam bentuk negatif, sebagai larangan, jadi sebagai apa yang wajib diusahakan, dan apa yang wajib dicegah oleh bangsa Indonesia.

### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dari segala debat tentang tempat dan rumusan sila ini menjadi jelas apa yang disepakati oleh para *founding fathers*. Mereka mau *menyatakan* dua hal: *Pertama*, religiositas, dan itu berarti: agama, adalah amat penting bagi bangsa Indonesia, maka religiositas bangsa Indonesia perlu didukung. *Kedua*, kita tidak membedakan antara agama-agama. Agama mayoritas tidak mendapat kedudukan istimewa dalam Republik, semua agama dan keyakinan tentang Ketuhanan Yang Mahaesa sama kedudukannya. Secara negatif sila ini *mengharamkan* dua hal: *pertama*, kebijakan yang anti agama dan anti-religiositas. *Kedua*, segala paksaan, tekanan, intimidasi dalam hal agama, termasuk pemanfaatan kekuatan negara untuk memaksakan kelakuan religius tertentu. Oleh karena itu sila pertama Pancasila mewajibkan pluralisme dalam arti pengakuan terhadap adanya keyakinan-keyakinan religius yang berbeda, yang semuanya dilindungi. Keagamaan yang didukung oleh Pancasila adalah keagamaan yang terbuka.

### **Kemanusiaan yang adil dan beradab**

Kemanusiaan berarti: komunikasi antar manusia di semua tingkat yang „manusiawi“. „Manusiawi“ tidak mengenai *homo sapiens* atau ciri-ciri fisik manusia tertentu, melainkan mengenai apa yang khas bagi manusia, sesuai dengan martabat manusia. Meskipun istilah itu barangkali tidak dimengerti luas, tetapi apa yang dimaksud diketahui setiap orang Indonesia yang waras. Rumus „kemanusiaan yang adil dan beradab“ termasuk rumusan etika politik yang paling bagus dan mendasar yang ada. „Kemanusiaan“: dasar etika bukan aturan-aturan tertentu melainkan harkat setiap orang sebagai manusia. Hormat terhadap harkat setiap orang sebagai manusia merupakan dasar segala etika. „Adil“ dan „beradab“ merupakan dua unsur paling dasar dalam hormat itu: Hubungan antar manusia selalu harus adil. Artinya, kebaikan apa pun apabila tidak adil, adalah tidak baik. Perbuatan yang tidak adil tak pernah benar. Dan garis dasar (*bottom line*) hubungan antar manusia yang etis adalah sikap yang *beradab*. Kelakuan yang tidak beradab tak pernah bisa benar. Maka tuntutan paling dasar Pancasila adalah: bawalah diri selalu secara beradab. Dan sebaliknya, kelakuan yang tak beradab tidak pernah bisa benar.

### **Persatuan nasional**

Dari kita semua diharapkan agar kita tidak hanya hidup bagi kebahagiaan privat kita dan keluarga maupun kampung kita, melainkan kita merasa solider senasib sepenanggungan dengan seluruh bangsa. Etika sila ketiga ini mengharuskan bahwa kita mampu untuk mencintai bangsa dan negara kita dan bersedia berkorban baginya.

### **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**

Latar belakang sila ini adalah kehendak agar Indonesia merdeka menjadi demokratis dan tidak jatuh ke dalam tangan kaum feodal lagi. Jadi sila kerakyatan bukan sekedar perasaan bersatu dengan rakyat, melainkan tekad bahwa nasib bangsa, dan kebijakan politik negara, betul-betul ditentukan oleh rakyat dan bukan oleh sebuah elit. Segala sistem diktatorial, paternalistik, demokrasi terpimpin dan lain bentuk kekuasaan sebuah elit *di atas* rakyat ditolak oleh sila ke-empat ini.

### **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Keadilan menjadi cita-cita paling utama para *founding fathers* bangsa Indonesia, bersama dengan kemerdekaan. Mereka anti penjajahan bukan hanya karena mereka mau merdeka, melainkan karena penjajahan merupakan sistem yang tidak adil, di mana rakyat dieksploitasi oleh sebuah elit, para penjajah dalam kerja sama dengan elit politik Indonesia sendiri. Maka sila kelima adalah pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam solidaritas, bahwa tidak boleh yang ditinggalkan apabila bangsa maju, bahwa bangsa tidak pernah boleh terpecah dua secara vertikal, antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak mempunyai harapan. Sila ini dengan demikian adalah juga penghormatan penyakit paling berbahaya yang membusukkan tubuh bangsa dan merusak kemampuannya, korupsi. Korupsi langsung bertentangan dengan keadilan sosial.

Jadi kita mempunyai etika nasional, etika yang harus meresapi budaya nasional, etika yang dirumuskan dalam Pancasila, suatu etika yang tidak hanya indah, melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, dalam damai, kesejahteraan dan solidaritas. Etika publik kita ini, etika Pancasila harus dirumuskan dengan cara yang dapat dimengerti oleh masyarakat kita, yang dapat langsung dirasakan kebenaran dan yang menimbulkan tekad untuk menjadikannya nyata. Saya mencoba untuk merumuskan etika Pancasila dalam lima pedoman atau tekad pendek:

1. Tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama!
2. Dalam situasi apa pun kita bertindak secara beradab!
3. Kita maju dan kita maju bersama!
4. Mari kita sukseskan demokrasi kita!
5. Mari kita dahulukan mereka yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi!

### **Sebagai penutup: Pendidikan**

Etika bangsa kita itu tadi hanya akan efektif apabila masyarakat betul-betul menginternalisasikan-nya. Internalisasi itulah yang akan memberdayakan manusia Indonesia agar ia menghadap tantangan-tantangan abad ke-21 dengan integritas dan meyakinkan. Dan itu berarti, masyarakat perlu didik. Lima larangan dan lima tekad bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sikap-sikap ini sudah lama merupakan nilai dalam budaya-budaya di Indonesia, maka perlu diangkat dan disadarkan agar menjadi rambu dan patokan efektif dalam membawa diri setiap orang. Untuk itu sepuluh sikap itu harus diajarkan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya di sekolah kepada anak-anak.

*Character building* oleh Sukarno pernah dianggap sangat penting. *Character building* itulah yang kita lakukan.